

Studi Formulasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Tani Kabupaten Bener Meriah

Patriandi Nuswantoro^{1*}, Billa²
Universitas Terbuka

ABSTRAK: Sektor pertanian dan perkebunan sebagai basis, Kabupaten Bener Meriah namun peran pemerintah dalam mendorong produktivitas masih minim/pemangku kepentingan di sektor tersebut. Lembaga penelitian komoditas yang berkembang dan kualitas sumber daya serta tenaga pengajar yang tersebar masih belum merata dan peran pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah masih minim. Menggunakan desain pendekatan kualitatif karena mengkaji kondisi alam objek dimana kunci penelitian berperan sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi bersama, analisis data induktif. Hasil penelitian menunjukkan kesejahteraan petani merupakan dasar dari mayoritas kebijakan sebagai pendapatan petani penduduk. Pemerintah di sektor pertanian belum maksimal mensejahterakan kehidupan masyarakat. Petani di Kecamatan Bener Meriah dihadapkan pada masalah produktivitas yang rendah, teknik pengolahan yang sederhana, daya saing dan struktur pasar yang kurang volatil. Dengan kata lain sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Bener Meriah dengan lebih lanjut tata kelola pertanian dan pengelolaan di sektor pertanian untuk mencapai kesejahteraan petani. Mempengaruhi perumusan kebijakan yang meliputi internal pemerintah daerah yang mencakup visi pemerintah yang jelas aturan dasar dan peraturan dalam komite kebijakan dan sumber daya pemerintah pusat. Faktor yang cukup mempengaruhi perumusan kebijakan eksternal meliputi persepsi rival politik lingkungan sosial kabupaten Bener Meriah.

Kata kunci: Kelembagaan, Perumusan Kebijakan Pertanian.

Bener Meriah Regency Farmer Institutional Development Policy Formulation Study

Patriandi Nuswantoro^{1*}, Billa^{2*}
Universitas Terbuka

ABSTRACT: Agricultural and plantation sector a basis, the district Bener Meriah the however the government role in encouraging the productivity are still minimal / stakeholders in the sector. The developing commodities research institutions and the quality of resources and to scatter instructor still not equal and the role of government to increase in still minin added value. Used the design a qualitative approach due to examine object natural condition where research key act as an instrument, technique data collection was carried out in joint triangulation, inductive data analysis is. The research results show the welfare of farmers is the basis the majority of policy as farmers income resident. The government in the agricultural sector not maximum welfare community life. The farmers in district Bener Meriah faced with the problem of low productivity, processing technique was simple, competitiveness and structure in less volatile markets. In other words the agricultural sector represents the backbone of the economy with a further district Bener Meriah agricultural governance and management in the agricultural sector to reach the welfare of farmers. Affect the formulation of policy covering on the internal regional government which includes the government vision clear basic rules and regulations in the central government policy and resources committee. Enough factors influencing the policy formulation of external covering the perception of political rivals social environment Bener Meriah district.

Keywords: Institutional, Farm Policy Formulation.

Submitted: 07-08-2022; Revised: 13-08-2022; Accepted:29-08-2022

***Corresponding Author:** patriandi12@gmail.com

PENDAHULUAN

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah priode 2017-2022, memiliki visi Bener Meriah Islami, Harmoni, Maju dan Sejahtera, serta kartu sakti (Kartu Petani Mulia) merupakan capaian gambaran kekuatan hubungan masyarakat, fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat yang setara pada peradaban yang tinggi serta memiliki cita-cita yang sama dalam keadaan aman, makmur dan sentosa.

Kemampuan dan pemahaman yang baik dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan baik. Kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur pembuatan kebijakan tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan pendapat Gerston (2002:14) bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Pembuatan kebijakan publik yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga pada akhirnya sebuah kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara baik.

Formulasi kebijakan sebagai sebuah tahap dalam proses kebijakan dalam mana sebuah isu yang menjadi agenda pemerintah diteruskan dalam bentuk hukum publik. Pengagendaaan isu pada dasarnya proses artikulasi dan agregasi yang merupakan fungsi input. Hukum publik adalah output sistem politik. Hasil yang diharapkan dalam formulasi kebijakan adalah solusi terhadap masalah publik. Formulasi merupakan aktivitas kebijakan yang tidak netral dari politik, sehingga kebijakan yang terbentuk merupakan resultante kompromi politik dari para actor yang berperan merumuskan kebijakan. Dunn (1999:21) metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yakni definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi.

Mayoritas penduduk di Kabupaten Bener Meriah merupakan petani, komoditi utama masih menitik beratkan pada perkebunan kopi rakyat dan tanaman hortikultura, dan mulai berkembangnya perkebunan sawit, coklat, pinang dan lain-lain serta berkembangnya sentra-sentra usaha kecil menengah dalam meningkatkan nilai tambah dari komoditi yang ada.

Konsep kebijakan dianggap memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Islamy (2003 : 20), kebijakan publik secara umum dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang diterapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh seluruh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu seluruh kepentingan masyarakat.

Faktor yang sangat penting dalam penyusunan sebuah kebijakan yaitu isu-isu apa saja yang layak dianggap sebagai masalah, atau bagaimana isu dirumuskan, bagaimana didefinisikan dengan baik ini dari sebuah masalah, nilai-nilai dan etika apa yang menyertai tujuan, sasaran dan penyelesaiannya.

Keban dalam Rakhmat (2009:152)), pada umumnya bentuk kebijakan dapat dibedakan atas 1) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang, 2) *redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, 3) *distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, dan 4) *constituent*, yaitu sebuah kebijakan yang ditujukan untuk melindungi negara. Kebijakan publik memiliki tujuan, sasaran yang berorientasi pada perilaku. Kebijakan publik dibuat oleh institusi pemerintah dan pejabatnya melalui proses politik. Perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi.

Kepentingan proses implementasi kebijakan publik yang selalu direspon oleh masyarakat secara positif, para perumus kebijakan harus senantiasa melakukan negosiasi secara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak suatu kebijakan (Islamy, 2003: 134). Perumusan dan implementasi kebijakan merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan sekalipun secara konseptual berbeda (Dunn, 1999: 167). Proses kebijakan publik merupakan tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan kebijakan.

Secara sistematis tahapan tersebut merupakan mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Islamy (2003:77-101) mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik yang meliputi :Perumusan masalah; Penyusunan agenda; Pemilihan alternatif; dan Penetapan kebijakan. Winarno (2002:83) pada bagian tahap perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

Perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing aktor.

Aktor atau pemeran dalam dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua bagian, yakni para pemeran resmi dan para pemeran tidak resmi. Termasuk dalam pemeran resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Termasuk kedalam pemeran tidak resmi adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. (Winarno, 2008: 126). Anderson (1997, 46-

67) sebagai pembuat kebijakan resmi (*official policymakers*) dan peserta non pemerintahan (*nongovernmental participants*).

Kegiatan perumusan keputusan/kebijakan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah dan sederhana. Administrator dituntut memiliki keahlian/kemampuan, tanggung jawab, dan kemauan sehingga ia dapat membuat kebijakan dengan segala resikonya, baik yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Nigro & Nigro (dalam Islamy, 2003:25-26)

Mengenai factor faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan/kebijakan yaitu;

- a) Adanya pengaruh tekanan dari luar;
- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme);
- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi;
- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar;
- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Anderson (dalam Wahab, 2004:3) melihat adanya beberapa macam nilai yang melandasi tingkah laku pembuat keputusan dalam membuat keputusan, yaitu : (1) nilai-nilai politis (*political values*); (2) nilai-nilai organisasi (*organization values*) keputusan-keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa (*rewards*) dan sanksi (*santions*) yang dapat dipengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya; (3) nilai-nilai pribadi (*personal values*) seringkali pula keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya; (4) nilai-nilai kebijakan (*policy values*) keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijakan tentang kepentingan publik atau pembuatan kebijakan yang secara moral dapat dipertanggung jawabkan, dan (5) nilai-nilai ideologi (*ideological values*) Nilai ideologi seperti misalnya nasionalisme dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan kebijakan dalam dan luar negeri.

Faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan dapat di klasifikasikan menjadi dua aspek yaitu:

1. Aspek internal pembuat kebijakan; meliputi sifat-sifat pribadi, persepsi dan nilai-nilai dasar yang danutnya, pengalaman-pengalaman.

2. Aspek eksternal meliputi dinamika dan tuntutan dunia realita kebiasaan/tradisi organisasi, lingkungan social, nilai-nilai, politik, organisasi, ideology

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Reformasi kelembagaan pembangunan pertanian tidak hanya berupa perampingan atau pengembangan struktur kelembagaan saja, namun juga pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani sebagai pemangku kepentingan utama pembangunan sektor pertanian (Suradisastra, 2006:64) Campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan pertanian (*agricultural policy*) diperlukan untuk mempengaruhi keputusan para *stakeholders* agar terlaksana pembangunan pertanian sesuai dengan yang direncanakan.

Peranan pemerintah peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, karena tujuan utama program yang dicanangkan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas petani (Rusli, 2010; 45).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses menjangkau informasi dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan suatu objek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Sugiyono (2017:8) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Lebih lanjut proses penelitian yang bertujuan mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif dalam bentuk tulisan, ungkapan dan perilaku manusia yang dapat diamati.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan mendeskripsikan secara sistematis formulasi kebijakan Bupati Bener Meriah pada Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kelembagaan Tani di Kabupaten Bener Meriah.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Peneliti memakai berbagai pertimbangan, yaitu berdasarkan konsep teori yang digunakan, serta keingintahuan peneliti pada penelitian tentang karakteristik pribadi dari obyek yang diteliti.

Secara khusus instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data :

1. Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung.
2. Wawancara mendalam (*in depth interview*) merupakan alat pengumpul data berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan bertatap muka langsung dengan nara sumber atau subjek yang diteliti
3. Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian dengan mengamati berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik dan tujuan penelitian, teknik ini sering disebut juga observasi historis.

Nasution (1996 : 18) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Proses formulasi kebijakan Bupati Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kelembagaan Tani di Kabupaten Bener Meriah melalui tahapan sebagai berikut;

1. Sumber Isu

Anderson dalam Wahab (2012:96) menjelaskan bahwa masalah kebijakan yaitu suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sehingga membutuhkan solusi yang segera.

Kemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah periode 2017-2022 memiliki catatan penting pada proses kampanye dengan perolehan suara yang sangat signifikan. Pasangan tersebut mengusung visi Bener Meriah Islami, Harmoni, Maju dan Sejahtera, serta Kartu Sakti (Kartu Petani Mulia).

“waktu kampanye pasangan Ahamdi *orom* tengku Sarkawi *janjie osahe* bantuan *ken petani i Bener Meriah* (saat kampanye pasangan Ahmadi dan tengku Sarkawi janjinya akan diberikan bantuan kepada para petani di Bener Meriah).

Hal ini diperjelas dengan pendapat Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah yang mengutip pendapat Bupati Bener Meriah:

“Program ini adalah program pertanian rakyat yang dilatar belakangi oleh sebuah keyakinan kita, bahwa secara tidak langsung Bener Meriah ini adalah zona perkebunan dan pertanian, seperti kopi dan horticultura, tapi belum ada insentif langsung kepada petani pada waktu itu, makanya kita buat suatu program yang memang langsung menyentuh kepada petani”.

Agenda kebijakan pada dasarnya merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintahan. Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah-masalah tersebut harus berkompetisi antara satu dengan yang lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk kedalam agenda kebijakan

2. Penyusunan Agenda

Formulasi kebijakan sebagai sebuah tahap dalam proses kebijakan yang merupakan sebuah isu yang menjadi agenda pemerintah diteruskan dalam bentuk hukum publik.

Tahap dalam formuasi kebijakan menurut Pasolong (2010:42-52) adalah dimana kebijakan dianalisis kemudian dicari fomulasi terbaiknya.

Formulasi kebijakan pengembangan kelembagaan tani bermula dari masyarakat Bener Meriah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani, selain itu momentum penetapan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 yang prioritaskan agenda kesejahteraan petani. Qanun Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah tahun 2017-2022, dengan visi Bener Meriah Islami, Harmoni, Maju dan Sejahtera, mengkhususkan agenda kesejahteraan petani pada misi ke-3 Mewujudkan tata kelola pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda;

“mekanisme perencanaan jangka menengah, visi dan misi calon kepala daerah, merupakan bagian bahan utama bagi kami dalam menyusun visi misi daerah, sebagaimana tertulis pada pedoman perencanaan secara nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Penyusunan RPJM, perlu saya tambahkan proses di Bappeda dalam menyusun RPJM kabupaten dimulai penyusunan secara teknokratik atau rancangan Awal RPJM, selanjutnya setelah bupati dipilih maka kami mengintegrasikan visi misi serta janji-janji kampanye dengan rancangan yang kami buat”.

Isu kesejahteraan serta intervensi politik sangat mempengaruhi agenda penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Bener Meriah , yang merupakan rujukan utama bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan rencana strategis.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan

Isu dikelola oleh masyarakat, ditangkap oleh pemangku kebijakan dan dijadikan sebuah agenda kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah bahwa:

“Perhatian Pemerintah Daerah terhadap petani bukan saja janji politik yang harus direalisasikan, namun telah menjadi problem Bangsa yang besar dengan kultur agraris pertanian sudah wajar dan pantas mendapatkan perhatian yang seharusnya. Hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus diwujudkan dan terimplementasi dalam kehidupan terutama amanah pada Pemeintah Daerah. Proses itu kan diawali dari, penganggaran yang biasa kita lakukan yaitu perencanaan penganggaran yang responsive karena kegiatan ditahun 2017 perencanaanya dimulai diawal”.

Kebijakan ini merupakan rangkaian alternatif dari penyaluran kebijakan bantuan sosial hal ini jelas disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset;

“Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos dari APBD Pasal 23a ayat (1), “bantuan sosial berupa uang dapat diberikan kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya”.

Dasar hukum bantuan sosial bagi petani juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Bener Meriah;

“Berdasarkan APBK murni pemberian bansos tersebut ditujukan kepada petani tidak mampu dengan menggunakan sumber data Basis Data Terpadu (BDT) yang diterbitkan Kementerian Sosial, sehingga langkah awal yang harus dilakukan oleh PPKD adalah melakukan seleksi nama dalam BDT tersebut, dengan tujuan untuk memilah individu mana saja yang berprofesi sebagai petani. Dalam hal ini, perlu diperhatikan jumlah petani tidak mampu yang dipilah sudah sesuai dengan anggaran per masing-masing petani (3.333 petani).” Kemudian, setelah pemilahan dilakukan, daftar nama petani tidak mampu tersebut disampaikan oleh Kepala BPKD selaku PPKD melalui surat resmi yang ditujukan kepada masing-masing Kepala Desa. Penyampaian surat tersebut dapat dilakukan

dengan dua cara Pertama, Kepala BPKD selaku PPKD memerintahkan pejabat/stafnya untuk menyebarkan surat konfirmasi kepada masing-masing Kepala Desa. Kedua, Kepala BPKD selaku PPKD mengumpulkan seluruh Kepala Desa dalam suatu pertemuan.

Awal mula perumusan program ini adalah merupakan bentuk kepedulian kami terhadap petani Bener Meriah yang merupakan tulang punggung perekonomian Bener Meriah. Pengembangan kelembagaan petani harus didukung dan bermanfaat sebagai jaminan kesejahteraan petani, jaminan penerima bantuan tepat sasaran, serta jaminan pembinaan petani. Pengembangan kelembagaan petani kedepannya diharapkan akan terintegrasi dengan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan jaminan penerima manfaat kredit dari pihak perbankan serta jaminan sosial lainnya.

Dengan demikian kebijakan pengembangan kelembagaan petanian merupakan turunan dari kebijakan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 tentang RPJM yang merupakan penterjemahan visi dan misi Bupati. Alternatif kebijakan kelembagaan tani terus diupayakan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bener Meriah.

Program pengembangan kelembagaan petani telah mewujudkan mekanisme penyaluran dalam bentuk kartu KPM (Kartu Petani Mulia) yang berisikan uang senilai Rp 900.000 untuk per penerima manfaat yang dapat dipergunakan sebagai alat transaksi dalam membeli kebutuhan seperti obat semprot, pupuk, bibit, dan lain sebagainya di toko yang telah bekerjasama dengan Bank Mandiri.

Mekanisme penyaluran Kartu Petani Mulia tahun anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Bupati Bener Meriah dan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 401/655/SK/2019 Tentang Penerimaan Bantuan Manfaat Sosial untuk petani miskin di Kabupaten Bener Meriah.

4. Aktor Perumus Kebijakan

Aktor merupakan penentu isi kebijakan dan dinamika tahap-tahap proses kebijakan. Aktor perumus kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu aktor resmi dan yang tidak resmi.

Peran serta aktor tidak resmi dalam perumusan kebijakan diikuti oleh kelompok-kelompok yang meskipun aktif dalam proses perumusan kebijakan namun mereka tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk membuat kewenangan yang mengikat. Peran serta tersebut dilakukan oleh kelompok kepentingan. Kelompok ini memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan publik. Kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu menyatakan tuntutan dan memberikan alternative tindakan kebijakan.

Faktor Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Kelembagaan Tani

Titik tolak dari formulasi kebijakan publik adalah memenuhi *value of money* yang isinya adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan input-output kebijakan yang menghasilkan efektifitas, efisiensi, dan ekonomis.

Faktor mempengaruhi formulasi kebijakan terdiri dari aspek internal pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah yang meliputi:

a. Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Sebagaimana disampaikan Kepala Plt Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah;

“Qanun Nomor 6 Tahun 2018 merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, dikuatkan kembali dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kelembagaan Petani dan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 401/655/SK/2019 Tentang Penerimaan Bantuan Manfaat Sosial untuk petani miskin di Kabupaten Bener Meriah”

b. Regulasi Peraturan yang Mendukung

Faktor regulasi peraturan terhadap kelembagaan tani sebagaimana di jelaskan meliputi regulasi undang-undang dan peraturan yang jelas sangat mendukung dari pemerintah pusat.

c. Sumber daya

Hal lain dalam aspek internal yang mempengaruhi formulasi kebijakan adalah Sumber daya pelaksana kegiatan kelembagaan tani cukup tersedia di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

Adapun aspek eksternal mempengaruhi formulasi kebijakan kelembagaan tani Kabupaten Bener Meriah adalah:

a. Persepsi Lawan Politik

Opini politik yang mampu menimbulkan ketidakpercayaan pada Pemerintah Daerah juga akan mempengaruhi unsur pengaruh yang besar pada opini masyarakat. Unsur kekuatan yang bersumber dari opini publik, pemberitaan media dan pencitraan tokoh lawan politik akan menjadikan

Formulasi Kebijakan dipandang sebagai mediasi politik yang menjatuhkan hingga membentuk opini masyarakat.

Realitas politik yang melingkupi proses pembuatan kebijakan publik tidak boleh dilepaskan dari fokus kajiannya. Sebab bila kita melepaskan kenyataan politik dari proses pembuatan kebijakan publik, maka jelas kebijakan publik yang dihasilkan itu akan miskin aspek lapangannya. Sebuah produk kebijakan publik yang miskin aspek lapangannya itu jelas akan menemui banyak persoalan pada tahap penerapan berikutnya.

b. Lingkungan Sosial

Piranti komunikasi telah banyak tersedia di masyarakat, namun demikian pengkomunikasian perlu keterampilan dan sistem komunikasi yang harmonis dibangun antar unsur-unsur yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Sistem komunikasi pemerintah daerah sebagai sumber utama harus memiliki konsistensi dan konseskwensi yang jelas dalam komunikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Sistematisa kebijakan kelembagaan tani di Kabupaten Bener Meriah telah melalui tahapan-tahapan dalam proses formulasi kebijakan yang merupakan mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Kebijakan kelembagaan petani di Bener Meriah di agendakan sejak penetapan visi-misi calon kepala daerah. Formulasi penyusunan agenda kebijakan sangat kompleks, proses dinamika yang terjadi dalam partisipasi aktor dari pemerintah maupun non pemerintah. Ide kebijkaan tersebut di kolaborasikan oleh para aktor penyusun kebijakan. Ragam alternatif kebijakan terus diupayakan dalam mewujudkan misi yaitu memajukan tata kelola pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Penetapan kebijakan juga mengacu pada evaluasi realiasi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang mendukung keberhasilan program pemerintah di bidang pertanian.

Faktor mempengaruhi formulasi kebijakan meliputi pada aspek internal pemerintah daerah yang meliputi visi pemerintah yang jelas dan regulasi peraturan yang mendasar pada pemerintah pusat serta sumber daya pelaksana kebijakan yang cukup. Faktor mempengaruhi formulasi kebijakan dari aspek eksternal meliputi persepsi lawan politik dan lingkungan sosial Kabupaten Bener Meriah.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera menyusun regulasi kebijakan kelembagaan tani yang merupakan bagian dari *multiplier efect* dalam banyak

penyelesaian permasalahan pada masyarakat khususnya petani di Kabupaten Bener Meriah.

Formulasi kebijakan pengembangan kelembagaan tani di Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan oleh para agen pelaksana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar tidak terjadi penggunaan yang tidak tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, A. 1997. *Public Policy Making* Third Edition, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company.
- Dunn, William. 1999. *Analisis Kebijakan*. Diterjemahkan Drs. Samodra Wibawa, Ma Dkk. Jakarta.
- Gerston, Larry N., 2002, *Public Policy Making in a Democratic Society: A Guide to Civic Engagement*, Armonk: M. E. Sharpe
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Nasution. (1996). *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Penerbit Tarsito
- Rakhmat, (2009), *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Jakarta: Pustaka Arif.
- Sugiono, (2010), *Metode Penelittian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suradisastra, K. 2006. Revitalisasi kelembagaan untuk kecepatan pembangunan sektor pertanian dalam otonomi daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol 4 No. 4, Desember 2006. *Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Litbang Pertanian*
- Wahab, Solichin Abdul (2004) *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi,ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi aksara
- Winarno, Budi (2008) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Press

Sumber lain (dokumen)

Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kelembagaan Petani dan

Qanun Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(Rpjmd) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022

Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 401/655/SK/2019 Tentang Penerimaan Bantuan Manfaat Sosial untuk petani miskin di Kabupaten Bener Meriah